



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD EKAPUTRA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN III
3. NHK : 876801

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.069.224.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 469.224.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	330.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 100 D Tahun 2002, HADIAH Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA Tahun 1987, LAINNYA Rp. 27.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA STARLET 1300 Tahun 1995, LAINNYA Rp. 40.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2024, LAINNYA Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.316.276
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.476.540.276
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.476.540.276

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.